

PENGENTASAN KEMISKINAN MELALUI PEMBANGUNAN JARINGAN EKONOMI PEDESAAN (Sebagai Suatu Strategi)*

Prijono Tjiptoherijanto**

Abstract

Various policies have been implemented by Indonesian government in its efforts to eliminate poverty. This paper proposes BKKBN's (National Family Planning Coordinating Agency) attempts which stress on poverty elimination in non-backward area by way of prosperous family development through expanding rural economic network. The program is started with improving movement of "pride of village" through programs of Pelaju (that of Harvesting, Processing and Selling), Pemaju (that of Packaging and Selling), and Penguja (that of Services-entrepreneurs) followed by Takesra (that of Savings for People's Prosperity) and Kukesra (that of Entrepreneurial Credit for Prosperous Family). Through the programs, rural families are expected to play roles in agribusiness and agrobusiness sectors, as well as in small-scale industry. With the benefit got from the programs, it is then expected that levels of families' income increase consequently, and number of poor families in rural areas can be eliminated.

Pendahuluan

GBHN 1993 secara khusus mengingatkan bahwa ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial menuntut usaha yang terpadu untuk mengatasinya agar tidak berkelanjutan dan berkembang ke arah kecemburuan sosial. Meskipun pembangunan ekonomi telah berhasil menurunkan jumlah penduduk miskin, berdasarkan data tahun 1996 jumlah keseluruhan penduduk miskin masih tercatat sekitar 22,6 juta jiwa atau sekitar 11,39

persen dari jumlah penduduk yang tersebar di wilayah Indonesia (Susenas, 1996).

Upaya pengentasan penduduk miskin pada saat ini jauh lebih sukar dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya karena jumlah penduduk miskin sudah makin berkurang, sementara lokasinya sangat menyebar. Jika dianalogikan dengan tahapan transisi kesehatan, pengentasan kemiskinan pada saat ini sudah mulai

* Makalah disampaikan pada Lokakarya dua hari Peluncuran Agenda 21 Indonesia oleh Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup, Hotel Millemium, 31 Maret 1997.

** Dr. Prijono Tjiptoherijanto adalah Asisten Menteri Negara Kependudukan Bidang Pengarahan Mobilitas Penduduk.

memasuki tahap *hard rock*. Untuk itu, upaya yang perlu dilakukan tidak lagi semata-mata mengandalkan pada kebijaksanaan mikro berupa terobosan-terobosan yang langsung berpengaruh pada peningkatan produktivitas golongan miskin tersebut. Keberhasilan peningkatan produktivitas penduduk miskin sangat tergantung pada ketepatan dalam mengidentifikasi *target group* dan *target area*, maka salah satu program pengentasan kemiskinan yang dikembangkan oleh pemerintah adalah memberikan bantuan kepada desa-desa tertinggal melalui Inpres Desa Tertinggal (IDT). Program yang dimulai sejak tahun anggaran 1994/1995 ini menyediakan dana sebesar 20 juta rupiah untuk setiap desa disertai dengan berbagai dukungan pembangunan lainnya bagi desa yang bersangkutan (Bappenas, 1993).

Setelah program IDT berjalan selama dua tahun lebih, pemerintah mempunyai pengetahuan yang makin baik dan pengalaman yang semakin luas mengenai cara mengentaskan penduduk dari belunggu kemiskinan. Oleh karena itu, program ini terus dilanjutkan dengan memperhatikan dan memperbaiki berbagai kelemahan yang ditemui di lapangan.

Meskipun demikian, pemerintah menyadari pula bahwa kemiskinan tidak saja terdapat di wilayah desa tertinggal. Penduduk atau keluarga miskin juga banyak ditemukan di luar wilayah desa tertinggal. Mereka ini harus pula menjadi sasaran program pengentasan kemiskinan agar tekad pemerintah untuk menghapuskan kemiskinan di Indonesia dapat segera terwujud. Oleh karena itu, pada

Oktober 1995 Presiden menugaskan Menteri Negara Kependudukan/Kepala BKKBN untuk secara khusus membantu upaya pemerintah mengentaskan Keluarga prasejahtera dan Keluarga sejahtera I yang berada di bawah garis kemiskinan di desa-desa tidak tertinggal (Kantor Menteri Negara Kependudukan/BKKBN, 1996).

Baik program IDT maupun program pengentasan kemiskinan keluarga prasejahtera dan sejahtera I di desa-desa tidak tertinggal diarahkan ke pedesaan. Oleh karenanya, perlu dikembangkan model-model ekonomi yang sesuai dengan kehidupan masyarakat pedesaan. Berikut diuraikan pengembangan model ekonomi pedesaan atau model ekonomi swasembada.

Pengertian, Kondisi Kemiskinan, dan Kesenjangan di Indonesia

Persoalan kemiskinan mengandung makna kesenjangan ekonomi dan pemerataan pendapatan. Kedua hal di atas merupakan topik yang hangat untuk dibicarakan mengingat masih besarnya pengangguran terselubung yang disebabkan oleh adanya pekerjaan yang dilakukan di bawah produktivitas kerja (*underemployment*), serta rendahnya kualitas tenaga kerja Indonesia. Diduga ada hubungan positif antara tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan tersebut.

Ada 2 ukuran yang biasa digunakan untuk menganalisis tingkat kemiskinan yaitu (1) kemiskinan absolut dan (2) kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut berkaitan dengan ketidakmampuan seseorang melampaui ukuran

kemiskinan yang telah ditetapkan. Sedangkan kemiskinan relatif berkaitan dengan perbedaan tingkat pendapatan suatu golongan dibandingkan dengan golongan lain. Di Indonesia, Biro Pusat Statistik menggunakan ukuran kemiskinan absolut berdasarkan pada kebutuhan kalori per hari sebesar 2100 kalori/orang/hari serta pengeluaran non-makanan lainnya. Kebutuhan pokok selain makanan meliputi: perumahan (penerangan, bahan bakar, dan air bersih), pakaian, barang tahan lama, dan jasa. Untuk pengeluaran jenis makanan, BPS tidak terpaku pada salah satu jenis makanan seperti beras sebagai patokan. Hal ini sesuai dengan keinginan pemerintah dalam melakukan diversifikasi bahan makanan. Dengan demikian, nilai uang dari jumlah kalori tersebut dihitung berdasarkan rasio konsumsi makanan terhadap konsumsi total rumah tangga sehingga diperoleh konsumsi total minimum yang dianggap sebagai batas

garis kemiskinan. Pada tahun 1996 batas kemiskinan di pedesaan adalah sekitar Rp20.000,00/orang/bulan atau Rp666,00/orang/hari, sedangkan di perkotaan adalah Rp30.000,00/orang/bulan atau Rp1.000,00/orang/hari.

Berdasarkan batas kemiskinan di atas, pada tahun 1996, dari lebih kurang 197 juta penduduk Indonesia, masih ditemukan 22,6 juta jiwa atau 11,39 persen penduduk berada di bawah garis kemiskinan atau berada dalam kategori kemiskinan absolut. Angka kemiskinan absolut pada tahun 1996 tersebut telah jauh menurun bila dibandingkan dengan tahun 1976 yang berjumlah 45 juta jiwa atau 40,1 persen dari seluruh penduduk yang ada (lihat Tabel 1). Bagaimana sebaran penduduk miskin tersebut? Data yang ada memperlihatkan bahwa 15,7 juta jiwa atau sekitar 69 persen dari penduduk miskin tinggal di pedesaan dan 6,9 juta jiwa atau sekitar 31 persen tinggal di perkotaan.

Tabel 1
Kondisi Kemiskinan di Indonesia, 1976-1996

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin						Rata-rata Penurunan Kemiskinan per tahun (%)		
	Kota		Dese		Total		Kota	Dese	Total
	Juta	Persen	Juta	Persen	Juta	Persen			
1976	10,0	30,6	42,2	40,4	45,2	48,1	-	-	-
1961	9,3	28,1	31,3	26,5	40,6	20,9	2,14	2,78	2,64
1985	9,5	23,1	20,3	16,4	30,0	17,4	1,25	2,59	2,37
1999	9,4	16,7	17,6	14,3	27,2	16,08	0,11	4,57	3,57
1993	6,7	13,4	17,2	13,7	25,9	13,67	2,48	1,12	1,59
1996*	6,9	10,07	15,7	12,61	22,6	11,39	1,02	1,02	1,02

Sumber: Tjiptohenjanto, 1996

Monteri Negara Kependudukan 1996: Dengar Pendapat dengan DPA tanggal 12 Maret 1996

*) Dihitung dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), modul konsumsi dan pendapatan rumah tangga BPS

Bila kondisi setiap daerah dianalisis lebih mendalam terlihat bahwa secara absolut jumlah penduduk miskin di pedesaan lebih banyak daripada di perkotaan (69 persen dibandingkan dengan 31 persen). Namun, bila dibandingkan dengan jumlah penduduk pada setiap daerah, terlihat bahwa proporsi penduduk miskin di pedesaan dan perkotaan relatif tidak berbeda.

Dari tabel yang sama (Tabel 1) terlihat bahwa antara tahun 1980-1990 persentase penurunan penduduk miskin di pedesaan lebih tinggi daripada persentase penurunan penduduk miskin di perkotaan. Namun, antara tahun 1990-1993 keadaan ini berubah. Persentase penurunan penduduk miskin di perkotaan menjadi jauh di atas penurunan penduduk miskin di pedesaan. Oleh karena itu, agar tingkat kesenjangan antara penduduk perkotaan dan pedesaan tidak semakin melebar, diperlukan program-program khusus yang dapat menstimulasi kegiatan perekonomian di pedesaan, yang pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan penduduk di daerah ini. Kebijakan yang lebih

memperhatikan pedesaan diperlukan untuk mengimbangi *urban bias policies* yang telah terjadi selama ini. Untuk itu, pada tahun 1994, program IDT mulai direalisasikan, yang kemudian disusul oleh program pengentasan keluarga prasejahtera dan sejahtera I melalui Inpres No. 3 Tahun 1996.

Selain berhasil mengurangi kemiskinan absolut, bangsa Indonesia juga berhasil mengurangi tingkat kesenjangan ekonomi atau lebih populer dengan istilah kemiskinan relatif. Indikator kesenjangan yang biasa dipergunakan seperti gini koefisien atau distribusi pendapatan memperlihatkan bahwa kondisi kesenjangan di Indonesia makin lama makin membaik (lihat Tabel 2).

Bila kondisi sumbangan 40 persen penduduk termiskin terhadap GNP dikaitkan dengan batasan yang diberikan oleh para ahli mengenai ukuran ketimpangan ekonomi, hal itu terbagi atas:

- a. tingkat ketimpangan tinggi (*high inequality*) apabila 40 persen dari penduduk berpenghasilan rendah menerima kurang dari 12 persen dari seluruh pendapatan nasional;

Tabel 2
Bagian dari Jumlah Pendapatan yang Diterima pada Tahun 1976 dan 1990

Wilayah	Bagian Terendah 40 % dari Penduduk		Bagian Menengah 40 % dari Penduduk		Bagian Atas 20 % dari Penduduk		Gini Ratio	
	1976	1990	1976	1990	1976	1990	1976	1990
Indonesia	11,15%	21,31%	32,1%	38,75%	58,73%	41,94%	0,52	0,32
Jawa	11,33%	20,81%	30,23%	33,19%	58,30%	48,20%	0,53	0,34
Luar Jawa	11,87%	22,93%	35,80%	39,87%	52,25%	37,20%	0,49	0,28

Sumber: Tjiptoherijanto, 1995

- b. tingkat ketimpangan sedang (*moderate inequality*) apabila mereka itu menerima antara 12-17 persen; dan
- c. tingkat ketimpangan rendah (*low inequality*) apabila mereka menerima 17 persen dan lebih dari pendapatan nasional secara keseluruhan.

Dengan demikian, kondisi ketimpangan ekonomi di Indonesia pada tahun 1990 telah termasuk dalam tingkat ketimpangan rendah. Kondisi ini sudah sangat jauh lebih baik dibandingkan dengan kondisi pada tahun 1976 yang masih berada pada kondisi tingkat ketimpangan tinggi.

Lebih lanjut terlihat pada Tabel 2 bahwa baik menurut perhitungan *Gini Ratio* maupun distribusi pendapatan, maka pola pembagian pendapatan di Jawa pada tahun 1976 dan pada tahun 1990 memberikan gambaran yang lebih buruk dibandingkan dengan keadaan di luar Pulau Jawa. Perbedaan antara golongan kaya dan miskin lebih mencolok di Pulau Jawa. Ledakan penduduk di Pulau Jawa merupakan salah satu penyebab pincangnya pembagian pendapatan di wilayah ini, selain juga oleh sebab-sebab lain. Demikian pula, kesenjangan di perkotaan lebih buruk daripada di pedesaan walaupun jumlah penduduk miskin di perkotaan lebih sedikit daripada di pedesaan. *Gini koefisien** untuk perkotaan pada tahun 1990 adalah 0,34 sedangkan untuk pedesaan adalah 0,25 (lihat Moeis, dkk., 1995).

Jika upaya formal dan makro sering terbentur pada berbagai peraturan dan kekakuan pelaksanaan, upaya informal melalui partisipasi masyarakat perlu dilakukan. Pajak dan pungutan, melembagakan infaq, shodaqoh, zakat, dan berbagai bentuk hibah dari sisi keagamaan bisa diusahakan. Selain itu, berbagai kebijaksanaan mikro melalui upaya tradisional, misalnya adat-istiadat yang selama ini diikuti pun masih tetap berlaku, seperti kebiasaan menyumbang, gugur-gunung, kerapatan nagari, tanggung renteng, dan lain sebagainya. Semua itu merupakan ungkapan kebersamaan tradisional yang masih dapat dimanfaatkan (Tjiptoherijanto, 1995).

Pada saat ini upaya penanganan kemiskinan penduduk melalui pendekatan mikro keluarga juga sedang diupayakan pemerintah melalui gerakan pembangunan keluarga sejahtera, yang dikoordinasi oleh Kantor Menteri Negara Kependudukan/BKKBN. Dalam upaya pembangunan keluarga sejahtera ini, keluarga-keluarga yang masih tergolong prasejahtera dan sejahtera I atau miskin ini diupayakan untuk ditingkatkan derajatnya menjadi keluarga sejahtera II dan seterusnya.

Keluarga Prasejahtera dan Sejahtera I

Dengan mengacu pada pembangunan keluarga sejahtera, maka miskin atau kurang sejahtera dapat digambarkan dengan kondisi keluarga sebagai berikut.

* *Gini koefisien* atau *gini ratio* yang digunakan untuk menggambarkan tingkat kepincangan pembagian pendapatan mempunyai nilai antara 0-1. Semakin besar angka koefisien gini, berarti semakin besar ketimpangan distribusi pendapatan.

* Keluarga prasejahtera adalah keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, seperti kebutuhan spiritual, pangan, sandang, papan, kesehatan, dan keluarga berencana. Secara operasional mereka tidak mampu memenuhi salah satu indikator berikut ini:

- menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya,
- makan minimal dua kali sehari,
- pakaian lebih dari satu pasang,
- sebagian besar lantai rumahnya tidak terbuat dari tanah; dan
- jika sakit dibawa ke sarana kesehatan

* Keluarga sejahtera I adalah keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan fisik secara minimal, tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan sosial dan psikologis seperti kebutuhan pendidikan, interaksi dalam keluarga, interaksi dengan lingkungan tempat tinggal, dan pekerjaan yang menjamin kehidupan layak. Secara operasional, mereka tampak tidak mampu memenuhi salah satu indikator berikut:

- menjalankan ibadah secara teratur,
- minimal seminggu sekali makan daging/telur/ikan,
- minimal memiliki baju baru sekali dalam setahun,
- luas lantai rumah rata-rata 8 m² per anggota keluarga,
- tidak ada anggota keluarga yang berusia 10-60 tahun yang buta huruf Latin,
- semua anak usia 5-15 tahun bersekolah,

- salah satu anggota keluarga memiliki penghasilan tetap; dan
- dalam 3 bulan terakhir tidak sakit dan dapat melaksanakan fungsinya dengan baik (Menteri Negara Kependudukan/Kepala BKKBN, 1996).

Bila diperhatikan, pengertian kemiskinan dan keluarga prasejahtera serta sejahtera I sebenarnya mengandung makna yang saling melengkapi. Pengertian kemiskinan lebih menggambarkan kondisi perekonomian masyarakat dari sudut makro. Sedangkan pengertian prasejahtera dan sejahtera I lebih menggambarkan kondisi perekonomian pada tingkat mikro atau keluarga, di samping juga menggambarkan kondisi nonperekonomian seperti sosial psikologis yang ada dalam keluarga. Bila mengacu pada teori kebutuhan, kebutuhan yang mendesak dari keluarga prasejahtera dan sejahtera I adalah kebutuhan ekonomi. Oleh karena itu, pengentasan keluarga prasejahtera dan sejahtera I lebih diarahkan pada upaya membantu perekonomian keluarga dalam arti membuat keluarga tersebut menjadi keluarga yang produktif.

Dalam upaya memberdayakan keluarga pada perekonomian nasional, maka konsep dan kerangka pikir ekonomi rakyat dan demokrasi ekonomi patut menjadi acuan. Pemahaman dan komitmen pada kedua konsep tersebut akan mengurangi keberpihakan yang terlalu besar pada golongan ekonomi kuat (konglomerat) serta lebih memperhatikan kelompok ekonomi rendah atau golongan masyarakat miskin.

Ekonomi Rakyat dan Demokrasi Ekonomi

Ekonomi rakyat dan demokrasi ekonomi yang didasarkan pada Pancasila dan UUD 1945 sudah lama menjadi cita-cita para pendiri republik ini. Pertumbuhan ekonomi nasional yang dilandasi oleh kekuatan rakyat dan bukan perseorangan atau kelompok dengan jelas dan jernih dituangkan dalam pemikiran besar Moh. Hatta. Dalam uraiannya, Bung Hatta (Tjiptoherijanto, 1996) menjelaskan pemikiran mengenai demokrasi ekonomi. Menurut beliau demokrasi ekonomi dilandasi oleh 3 hal. Pertama, etika sosial yang tersimpul dalam nilai-nilai Pancasila; kedua, rasionalitas ekonomi yang diwujudkan dalam perencanaan ekonomi yang dijalankan oleh negara; dan ketiga, organisasi ekonomi yang didasarkan pada asas usaha bersama atau koperasi, keswadayaan (*self-help*) dan *auto-activa*.

Pemikiran mengenai demokrasi ekonomi rakyat ini tercermin dalam trilogi pembangunan nasional yaitu pertumbuhan, pemerataan, dan stabilitas. Selain itu, peranan rakyat dalam menggerakkan ekonomi nasional tercermin dalam bentuk Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/BUMD), serta koperasi, di samping sektor swasta dalam menopang perkembangan per-ekonomian nasional.

Pengembangan model ekonomi rakyat didasarkan pada pemikiran bahwa sektor usaha swasta cenderung akan lebih mementingkan kepentingan kelompoknya dibandingkan dengan

kepentingan rakyat banyak. Oleh karena itu, sektor swasta mungkin dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, namun kurang mampu mencapai sasaran pemerataan. Dalam hal pemerataan, ekonomi rakyat mempunyai kesempatan yang lebih besar karena mampu menjangkau masyarakat hingga tingkat yang paling bawah. Oleh karena itu, dalam mencapai tujuan ekonomi nasional yaitu pertumbuhan dan keseimbangan, peranan ekonomi rakyat dan swasta harus berjalan secara seimbang hingga pada akhirnya tercapai masyarakat yang adil dan makmur.

Untuk menjadikan 3 pelaku ekonomi nasional yaitu koperasi, BUMN/BUMD, dan swasta sebagai pelaku ekonomi yang tangguh, maka prinsip-prinsip demokrasi ekonomi Pancasila yang meliputi aspek pertumbuhan, pemerataan dan keadilan, baik antargolongan, daerah, maupun sektor usaha harus menjadi landasan utamanya (Nasution, Anwar, 1992). Tidak adanya keberpilihan pada suatu kelompok usaha atau daerah dalam rangka mengejar pertumbuhan ekonomi nasional merupakan salah satu landasan yang harus dianut dalam sistem demokrasi ekonomi Pancasila.

Dalam kaitan dengan pemerataan distribusi pendapatan antarperkotaan dan pedesaan dibutuhkan berbagai upaya yang dapat meningkatkan kemandirian ekonomi pedesaan, antara lain melalui peningkatan peranan ekonomi rakyat yang dijabarkan melalui peranan koperasi di pedesaan.

Ekonomi Pedesaan dan Ekonomi Swasembada

Pengentasan kemiskinan, baik melalui program IDT maupun program non-IDT pada dasarnya mengacu pada upaya peningkatan atau penstimulan aktivitas perekonomian di pedesaan. Aktivitas perekonomian pada umumnya didasarkan pada kegiatan investasi, antara lain, dipengaruhi oleh jumlah tabungan yang terakumulasi serta tingkat harga modal untuk investasi yakni berupa tingkat bunga yang harus dibayar untuk balas jasa modal. Dengan demikian, jelaslah bahwa harga barang atau jasa adalah masalah sentral dalam pembahasan perekonomian pada umumnya, maupun perekonomian pedesaan pada khususnya (Nurdin, 1996).

Dalam kerangka dasar pemikiran pengembangan program IDT maupun pembangunan keluarga sejahtera di daerah tidak tertinggal, dikemukakan bahwa kemiskinan yang terjadi, terutama di pedesaan, bukan karena dikehendaki oleh si miskin, melainkan karena tidak dapat dihindari dengan kekuatan yang ada padanya. Kemiskinan antara lain ditandai oleh sikap dan tingkah laku menerima keadaan, yang seakan-akan tidak dapat diubah. Hal ini tercermin dalam lemahnya keinginan untuk maju, rendahnya kualitas sumber daya manusia, lemahnya nilai tukar hasil produksi, rendahnya produktivitas, terbatasnya modal yang dimiliki, rendahnya pendapatan, dan terbatasnya kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan (Bappenas, 1993; Mubyarto, 1996).

Kondisi di atas sangat umum terlihat di pedesaan. Kenyataan memperlihatkan bahwa tingkat harga dalam perekonomian desa sangat ditentukan oleh kekuatan ekonomi di luar pedesaan, antara lain oleh para pedagang perantara, khususnya baik untuk barang produksi hasil industri maupun hasil pertanian desa. Ketidakmampuan masyarakat pedesaan untuk melakukan *bargaining* dengan pelaku dari luar pedesaan disebabkan oleh banyak faktor, antara lain kurangnya modal, rendahnya tingkat pengetahuan dan keterampilan, dan lain sebagainya. Lemahnya posisi dalam *bargaining* ini akan menggerogoti kekuatan ekonomi masyarakat desa sehingga mereka kurang berdaya dalam sistem ekonomi pasar untuk bersaing bebas antara sesama pelaku ekonomi (Nurdin, 1996).

Dalam hal ini, ekonomi pedesaan tidak mungkin dibiarkan bersaing dengan pelaku ekonomi lainnya, terutama mereka yang berasal dari perkotaan. Untuk itu, dalam upaya menggerakkan daya ekonomi pedesaan pada umumnya dan masyarakat desa pada khususnya diperlukan sejumlah investasi tertentu. Investasi ini harus dilakukan sendiri oleh masyarakat desa (swasembada) agar pelaku ekonomi yang ada di pedesaan merasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap investasi yang mereka lakukan.

Pertanyaannya sekarang adalah dari mana mereka memperoleh modal untuk melakukan investasi? Di sinilah peran pemerintah dalam membantu mengembangkan modal awal bagi aktivitas perekonomian pedesaan. Ada beberapa program yang dapat

dilakukan, antara lain melalui mekanisme akumulasi dan alokasi tabungan serta penciptaan modal bergulir (*revolving funds*) dalam kerangka pemikiran ekonomi kelembagaan. Dalam kaitan dengan penciptaan modal bergulir tersebut, kerangka pemikiran ekonomi kelembagaan perlu digarisbawahi, mengingat keberhasilan modal bergulir sangat tergantung pada eksistensi kelompok.

Program IDT maupun Takesra dan Kukesra yang dikembangkan di daerah desa tidak tertinggal pada dasarnya merupakan bentuk penciptaan modal bergulir (*revolving funds*) dalam upaya membantu menyediakan modal awal investasi bagi perekonomian pedesaan agar tercipta perekonomian yang swasembada di pedesaan. Program IDT dan pembangunan keluarga sejahtera di daerah tidak tertinggal adalah program untuk menumbuhkan dan memperkuat kemampuan penduduk miskin atau prasejahtera dan sejahtera I dalam meningkatkan taraf hidupnya dengan membuka kesempatan berusaha. Dalam rangka itu, program IDT dan keluarga sejahtera diarahkan pada pengembangan kegiatan sosial ekonomi untuk mewujudkan kemandirian penduduk miskin di desa dengan menerapkan prinsip gotong royong, keswadayaan, dan partisipasi (Sayogyo, 1996).

Meskipun demikian, keberhasilan menggerakkan ekonomi pedesaan menuju ekonomi yang swasembada tidak saja tergantung pada penciptaan modal bergulir, namun juga bagaimana membantu masyarakat desa mengembangkan jiwa kewiraswastan, meningkatkan pengetahuan pasar

dan lain sebagainya melalui pendidikan, latihan, dan bantuan pemasaran. Sayogyo (1996) mengemukakan bahwa keberhasilan program ekonomi pedesaan, termasuk program IDT, keluarga sejahtera, maupun program lainnya sangat tergantung pada partisipasi anggota kelompok. Dalam hal ini perencanaan *top down* dan *bottom up* harus benar-benar diperhatikan dalam mengembangkan setiap program di pedesaan. Lebih lanjut Sayogyo mengemukakan bahwa dalam banyak hal, ketidakberhasilan suatu program pembangunan yang terutama terjadi di pedesaan, termasuk pengembangan ekonomi pedesaan yang swasembada ialah karena kurangnya bentuk partisipasi aktif dari anggota kelompok, atau kurangnya perencanaan yang bersifat *bottom-up* dan terlalu menekankan pada perencanaan *top down*.

Upaya Pengentasan Kemiskinan melalui Pembangunan Keluarga Sejahtera di Desa tidak Tertinggal

Undang-Undang No.10 Tahun 1992 memberikan batasan mengenai keluarga sejahtera yaitu keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antaranggota, antarkeluarga dengan masyarakat dan lingkungan.

Berdasarkan pada pengertian di atas, dikembangkan indikator yang dapat mencerminkan tingkat kesejahteraan keluarga di Indonesia dari waktu ke waktu. Dalam indikator

tersebut, tingkat kesejahteraan keluarga dibagi dalam 5 tahapan yaitu tahap prasejahtera, tahap sejahtera I, tahap sejahtera II, tahap sejahtera III, dan tahap sejahtera III + (Menteri Negara Kependudukan/Kepala BKKBN, 1996).

Keluarga-keluarga yang tergolong dalam prasejahtera dan sejahtera I ditandai dengan masih sangat lemahnya kemampuan perekonomian keluarga. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi menjadi fokus utama dalam upaya mengentaskan keluarga miskin atau keluarga-keluarga prasejahtera dan sejahtera I menjadi keluarga yang memiliki tahapan lebih tinggi. Berdasarkan pendataan keluarga sejahtera yang dilakukan pada awal tahun 1995, maka saat ini diketahui masih ada sekitar 22,9 juta atau 55,79 persen dari seluruh keluarga di Indonesia berada pada tahap prasejahtera dan sejahtera I atau keluarga yang tergolong miskin. Dari 22,9 juta keluarga miskin, sebanyak 12,2 juta keluarga atau sekitar 30 persen di antaranya miskin karena alasan ekonomi. Sisanya ialah karena sebab-sebab lain (Kantor Menteri Negara Kependudukan/BKKBN, 1997).

Untuk mengentaskan keluarga-keluarga miskin tersebut, Kantor Menteri Negara Kependudukan/BKKBN meluncurkan berbagai program, antara lain Gerakan Bangsa Suka Desa yakni Gerakan Pembangunan Keluarga Modern dalam Suasana Kota di Desa. Sasaran dari gerakan ini adalah peningkatan pendapatan keluarga melalui kegiatan petik olah jual dan untung (pelaju), proses kemas jual dan untung (pemaju), dan

pengusaha jasa (penguja). Untuk dapat merealisasikan kegiatan pelaju, pemaju dan penguja, pemerintah menyediakan bantuan modal berbunga lunak.

Takesra dan Kukesra

Sebagai modal investasi keluarga, program Takesra (Tabungan Keluarga Sejahtera) dan Kukesra (Kredit Keluarga Sejahtera) dicanangkan setelah sebelumnya para konglomerat yang tergabung dalam Kelompok Jimbaran dan Kelompok Keppres 90 bersepakat untuk memberikan bantuan modal bagi para calon usahawan dari kelompok keluarga miskin. Pemberian modal tersebut diselaraskan dengan upaya mengembangkan ekonomi pedesaan yang mandiri dan swasembada. Oleh karena itu, modal investasi yang dikembangkan harus berasal dari dana tabungan masyarakat itu sendiri melalui penciptaan sistem modal bergulir (*revolving funds*) ditambah dengan bantuan modal dari kedua kelompok tersebut di atas. Takesra dan Kukesra merupakan bentuk penjabaran dari prinsip modal bergulir dengan memanfaatkan jasa pelayanan perbankan dan jasa pos serta jasa-jasa pelayanan lain.

Dibandingkan dengan bentuk tabungan lain, Takesra memiliki berbagai manfaat khusus sebagai berikut: (i) sebagai alat menyimpan uang, (ii) sebagai agunan kredit, (iii) sebagai sarana pengiriman dan penerimaan uang, (iv) sebagai wahana program kemitraan, dan (v) sebagai alat bantu transaksi pembelian barang dan jasa. Apabila dilihat fungsinya sebagai alat menyimpan uang (*a store of*

value) dan sekaligus sebagai sarana pengiriman dan penerimaan uang. Takesra tidak berbeda dengan bentuk-bentuk tabungan lainnya. Demikian pula, dalam fungsi sebagai alat bantu transaksi pembelian barang dan jasa, maka seperti halnya *demand deposits* lainnya, Takesra dapat membantu mempermudah transaksi pembelian barang dan jasa karena dapat diuangkan sewaktu-waktu. Tidak sangsi lagi bahwa Takesra juga merupakan salah satu *near money*, hak milik yang mempunyai nilai simpan, tetapi tidak langsung bisa digunakan sebagai alat pertukaran atau transaksi (*not as a medium of exchange*). Fungsi yang menonjol dari Takesra adalah sebagai agunan kredit dan sebagai wahana program kemitraan (Tjiptoherijanto 1996).

Sebagai agunan kredit, setiap penabung Takesra, dengan saldo awal hanya sebesar Rp2.000,00 dapat memperoleh modal usaha melalui Kredit Usaha Keluarga Sejahtera (Kukesra) sebesar 5 sampai dengan 10 saldo tabungan dengan bunga 6 persen per tahun. Dari setiap kredit yang diperoleh, akan disisihkan sebesar 10% untuk langsung dimasukkan ke dalam rekening Takesra yang bersangkutan. Dengan demikian, jumlah tabungan menjadi Rp4.000,00 yang dapat digunakan sebagai agunan untuk mendapatkan Kukesra selanjutnya. Demikian terus bergulir sampai ada kemungkinan keluarga penabung dapat memperoleh kredit sebesar Rp320.000,00, yang cukup digunakan untuk membuka usaha kecil-kecilan atau industri rumah tangga yang dapat meningkatkan kehidupannya, terbebas dari belenggu kemiskinan.

Sampai dengan pertengahan Januari 1997, dana Takesra telah mencapai sekitar Rp366 miliar. Sementara itu, sejak dicanangkannya program Takesra dan Kukesra, dana yang tersalur telah mencapai sekitar Rp183,6 miliar. Jumlah ini diperkirakan akan terus bertambah seiring dengan bertambahnya jumlah kelompok UPPKS. Dalam hal ini, Kukesra hanya dapat diperoleh apabila keluarga bergabung dalam kelompok-kelompok yaitu kelompok UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera) yang beranggota maksimal 30 keluarga.

Kalau dilihat secara mikro, besaran dana yang diperoleh kelompok keluarga sangat kecil. Namun, karena kegiatan pengentasan kemiskinan ini dilaksanakan secara serentak, dengan 22 juta keluarga yang masih perlu disantuni, kegiatan ini akhirnya menjadi gerakan perekonomian rakyat, yang tentu saja akan berdampak pada perekonomian nasional. Apabila sebagian besar kelompok usaha mampu mengembangkan usaha hingga per keluarga dapat memperoleh dana Kukesra sebesar Rp40.000,00 atau bahkan lebih, kredit yang diperoleh tersebut dipergunakan terus untuk memutar perekonomian pedesaan. Perputaran uang dan modal di pedesaan akan meningkat, lebih stabil, dan jarang terganggu resesi. Pada gilirannya, perekonomian pedesaan akan berkembang menjadi penggerak perekonomian nasional.

Untuk menunjang kelancaran usaha keluarga tersebut, secara bersamaan diluncurkan pula gerakan bangga suka desa.

Gerakan Bangga Suka Desa

Pengembangan gerakan bangga suka desa, selain ditujukan untuk pengentasan keluarga prasejahtera dan sejahtera I, juga dimaksudkan untuk membangun ekonomi pedesaan yaitu melalui pengembangan ekonomi pedesaan yang mandiri atau swasembada.

Untuk itu, perlu dikembangkan suatu gerakan yang mampu memutar roda perekonomian pedesaan tanpa meninggalkan ciri-ciri komunitas pedesaan. Gerakan bangga suka desa yang dicanangkan oleh Presiden pada tanggal 29 Juni 1995 di Yogyakarta merupakan gerakan yang bertujuan memotivasi masyarakat pedesaan untuk hidup modern sebagaimana layaknya penduduk perkotaan, terutama dalam hal jiwa kewiraswastan, namun tanpa meninggalkan sifat komunitas penduduk pedesaan.

Dengan demikian, gerakan bangga suka desa adalah upaya terpadu yang bertujuan mempercepat proses pengembangan keluarga dan penduduk pedesaan menjadi keluarga dan penduduk dengan ciri modern perkotaan. Gerakan ini difokuskan untuk membangun keluarga modern dan maju di pedesaan agar mereka bisa menjadi agen pembangunan di desanya. Berbagai usaha pemampuan keluarga di pedesaan yang telah dilakukan selama ini akan berlanjut terus dan diintensifkan. Keluarga-keluarga akan dikembangkan kemampuannya secara bertahap dengan memperkuat motivasi, kesehatan, pendidikan, dan keterampilannya, serta diberi kesempatan untuk berperan dalam berbagai pembangun-

an (Menteri Negara Kependudukan/Kepala BKKBN 1996).

Di samping itu, gerakan ini merupakan salah satu alternatif untuk mengatasi perpindahan penduduk dari desa ke kota, yang menyebabkan terjadinya urbanisasi dengan segala konsekuensinya, baik positif maupun negatif. Di samping itu, sekaligus untuk meningkatkan kehidupan masyarakat desa dari bawah batas garis kemiskinan.

Sebagaimana halnya pembangunan ekonomi pedesaan yang menekankan pada kerangka pemikiran ekonomi kelembagaan, keberhasilan gerakan bangga suka desa sangat tergantung pada eksistensi kelompok atau lembaga. Keberhasilan ekonomi kelembagaan tergantung, antara lain, oleh tingkah laku perorangan anggota, kelompok masyarakat, bidang usaha ekonominya, upaya peningkatan kesejahteraan melalui peningkatan harga barang yang dihasilkan, upah tenaga kerja, kesempatan kerja yang terbuka, hubungan konsumsi dengan tabungan yang ada, serta kaitannya dengan tujuan-tujuan investasi ekonomi pedesaan. Oleh karena itu, keberhasilan gerakan bangga suka desa juga tidak terlepas dari berbagai faktor di atas.

Untuk mendukung gerakan bangga suka desa telah dilakukan kegiatan sebagai berikut ini.

1. Pengembangan kegiatan ekonomi produktif:
 - latihan ketrampilan,
 - bimbingan kewirausahaan,
 - bantuan permodalan melalui Usaha Peningkatan Keluarga Sejahtera (UPPKS), dan
 - bimbingan pemasaran.

2. Penggalangan tabungan dan sumbangan masyarakat untuk membangun desa melalui Takesra (Tabungan Keluarga Sejahtera) dan Kukesra (Kredit Usaha Keluarga Sejahtera):
 - kampanye gerakan cinta desa dengan melibatkan paguyuban masyarakat daerah yang tinggal di kota,
 - kampanye penggunaan jasa bank untuk pengiriman uang ke desa dan pengembangan kegiatan ekonomi produktif, dan
 - penyelenggaraan lelang kepedulian untuk mendukung pembangunan keluarga di desa.
3. Pengembangan fasilitas ekonomi pedesaan:
 - penyelenggaraan pasar mingguan,
 - Pengembangan kios telepon (kiospon),
 - pengembangan salon kecantikan desa, dan
 - pengembangan kegiatan pelayanan jasa.
4. Dukungan dan pengembangan peluang pasar (a.l. melalui sarasehan pedesaan):
 - pameran potensi desa,
 - temu pengusaha, dan
 - pengembangan kerja sama kemitraan pengusaha yang mampu dengan keluarga di desa.

Pembangunan Jaringan Ekonomi Pedesaan Modernisasi Lembaga/Instansi Ekonomi di Pedesaan

Untuk mendukung pengembangan sumber daya keluarga dan sumber daya manusia di pedesaan diperlukan serangkaian intervensi sosial ekonomi

yang mendorong perubahan dari kondisi agraris menjadi kondisi industri. Selama ini telah lama dikenal adanya lembaga instansi ekonomi di pedesaan yang menghidupkan kegiatan ekonomi pedesaan yang tradisional seperti lumbung desa, pedagang pengumpul hasil pertanian, pasar mingguan, pasar ternak, KUD, dan sebagainya. Eksistensi dan manfaatnya telah cukup dirasakan oleh masyarakat pedesaan. Hanya saja, pertumbuhan dan perkembangannya relatif lambat.

Terdapat 2 karakteristik bidang pekerjaan yang pada umumnya berkembang di pedesaan yaitu (1) masih bertumpu pada sektor informal dibandingkan dengan sektor formal (lihat Tabel 3) dan (2) masih bertumpu pada sektor pertanian tradisional. Karakteristik kedua sektor di atas yaitu sektor informal dan sektor pertanian ditandai antara lain produktivitas rendah, jam kerja tidak teratur, modal kecil, manajemen bersifat tradisional, dan sebagainya. Oleh karena itu, sulit bagi daerah pedesaan untuk melakukan persaingan dalam arena ekonomi pasar bebas yang berlangsung saat ini bila ciri-ciri sektor usaha mereka masih mengandalkan pada sektor informal dan pertanian tradisional.

Dalam kaitannya dengan ciri penduduk dan keluarga modern, dituntut adanya penguasaan manajemen perekonomian modern dan sekaligus diciptakan modernisasi lembaga/instansi ekonomi di pedesaan. Penguasaan manajemen ekonomi modern dan modernisasi lembaga ekonomi di pedesaan tidak lain bertujuan agar penduduk

Tabel 3
Komposisi Pekerjaan berdasarkan Sektor Formel dan Informal di Perkotaan dan Pedesaan Tahun 1992

Tempat Tinggal	Formal	Informal	Total
Kota	11.681.668 (54,97%)	9.689.127 (45,03%)	21.250.735 (100%)
Desa	12.000.310 (20,95%)	45.267.327 (79,05%)	57.267.837 (100%)
Total	23.881.918 (30,18%)	54.838.454 (89,84%)	78.518.372 (100%)

Sumber: BPS, 1993, *Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia 1992*

pedesaan mampu bersaing dengan pelaku ekonomi dari luar pedesaan dan mengatur sendiri sistem perekonomian yang mereka miliki. Di samping penguasaan manajemen ekonomi modern dan modernisasi lembaga ekonomi di pedesaan, upaya lain untuk mempercepat timbulnya ekonomi pedesaan yang swasembada adalah meningkatkan lapangan usaha penduduk di pedesaan dengan tidak semata-mata mengandalkan pada sektor pertanian tradisional. Program pelaju, pemaju, dan penguja yang sekarang ini dikembangkan, selain dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk di pedesaan juga berdampak pada peningkatan produktivitas.

Peningkatan Pemasaran dan Kualitas Produk

Untuk mendorong pembangunan yang makin marak, kepada keluarga di pedesaan diberikan suasana yang sangat menunjang, yang membuat

mereka makin betah tinggal dan berusaha di pedesaan.

Kegiatan ekonomi pedesaan diharapkan makin beragam, tidak lagi hanya menjual produk pertanian, tetapi sudah mengacu kepada produk nonpertanian, jasa, dan industri.

Industri-industri rumah tangga yang berkembang di pedesaan akan merangsang modal dan teknologi beralih masuk ke pedesaan. Desain dan kualitas produk yang dihasilkan akan makin baik dan seahligus merangsang pula kegiatan ekonomi produktif lainnya dan sistem pemasarannya.

Berbagai kegiatan ekonomi produktif di pedesaan yang diharapkan berkembang antara lain adalah sebagai berikut.

1. Masyarakat pedesaan melakukan intensifikasi lahan pertanian dan pemanfaatan tanah pekarangan; tidak terbatas pada tanaman pangan, tetapi mencakup kegiatan perikanan dan peternakan.
2. Industri rumah tangga mengacu pada petik, olah, jual, dan untung untuk hasil pertanian dan proses, kemas, jual, dan untung untuk hasil nonpertanian,
3. Penguja diadakan karena sektor jasa di pedesaan akan semakin beragam dan memberikan pelayanan, bukan saja untuk penduduk pedesaan itu sendiri bahkan dapat pula berupa pelayanan kebutuhan penduduk kota yang berlibur di desa. Kegiatan pelayanan jasa itu, antara lain, adalah bengkel las, bengkel mobil, angkutan ojek, salon kecantikan, dan lain-lain.

Tumbuhnya kegiatan-kegiatan tersebut akan mendorong makin meningkatnya pemasaran di pedesaan.

Peranan Kelompok Keluarga dalam Menggerakkan Ekonomi Desa

Ekonomi kelembagaan sudah lama diketahui berperan dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi, terutama di pedesaan. Berbeda dengan karakteristik penduduk perkotaan yang memiliki tingkat pendidikan dan aksesibilitas yang tinggi, penduduk pedesaan pada umumnya masih memiliki tingkat pendidikan, pengetahuan, dan pengalaman yang rendah dalam sistem ekonomi modern. Oleh karena itu, dalam mengembangkan ekonomi pedesaan, sistem ekonomi kelembagaan dipandang lebih cocok dibandingkan dengan sistem ekonomi perseorangan. Para ahli berpendapat bahwa lembaga dapat diartikan sebagai suatu norma/kaidah peraturan atau organisasi yang memudahkan koordinasi dalam membentuk harapan masing-masing, yang mungkin dapat dicapai dengan saling bekerja sama (Nurdin, 1996, Sayogyo, 1996).

Saat ini program pengentasan kemiskinan, baik melalui program IDT maupun keluarga sejahtera, mengacu pada upaya memperkuat peranan kelompok. Sebagaimana diketahui, untuk membantu keluarga-keluarga yang telah memiliki motivasi guna mewujudkan keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera, telah dikembangkan program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS). Program ini merupakan dukungan untuk

meningkatkan kemampuan keluarga melalui usaha bersama.

Jika selama ini kegiatan ekonomi desa hanya mengandalkan sektor pertanian tradisional, nantinya diharapkan kelompok keluarga mampu berperan dalam kegiatan ekonomi produktif di lingkup agribisnis dan agrobisnis atau industri kecil. Mengapa penduduk pedesaan diharapkan dapat meningkatkan usahanya dari sekedar pertanian tradisional? Tabel 4 memperlihatkan bahwa pertanian merupakan sektor yang rawan terhadap kemiskinan.

Berkaitan dengan hal tersebut, pengentasan kemiskinan di pedesaan memerlukan upaya peningkatan usaha penduduk daripada sekedar mengandalkan pada pertanian tradisional menjadi usaha yang bersifat agribisnis. Program petik, olah, jual, dan untung (pelaju) atau proses, kemas, jual, dan untung (pemaju) diharapkan mampu menjadikan penduduk pedesaan dapat menikmati keuntungan dari proses perdagangan yang selama ini tidak pernah mereka nikmati jika mereka hanya mengandalkan sektor usaha pertanian tradisional.

Penutup

Telah menjadi tekad pemerintah untuk menuntaskan masalah kemiskinan, baik absolut maupun relatif dalam PJP II ini. Oleh karena itu, berbagai kebijaksanaan ekonomi makro dan mikro dikembangkan untuk mencapai tujuan yang dimaksud. Pada saat ini paling tidak terdapat 2 program besar pemerintah yang memfokuskan pada upaya

Tabel 4
Sumber Penghasilan Rumah Tangga Miskin dan Tidak Miskin
menurut Sektor Usaha dan Daerah, 1990 (dalam Persentase)

Daerah	Sektor Usaha										Total
	Pertanian	Perkebunan	Peternakan	Perikanan	Kehutanan	Industri	Perdagangan	Pengangkutan	Jasa	Lain-lain	
Desa											
Miskin	45,11	26,85	11,72	2,15	1,74	3,06	5,25	0,77	1,63	1,72	100
Tidak Miskin	39,49	21,80	9,67	2,77	1,21	4,01	14,26	2,78	2,26	1,74	100
Kota											
Miskin	24,43	5,79	4,65	3,48	0,47	6,07	33,13	10,57	72,61	4,15	100
Tidak Miskin	6,68	3,07	1,81	2,13	0,20	7,40	51,91	11,05	11,71	4,04	100
Kota + Desa											
Miskin	39,72	21,36	9,88	2,50	1,41	3,84	12,52	3,32	3,10	2,35	100
Tidak Miskin	32,55	17,84	8,01	2,64	1,00	4,72	22,23	4,53	4,26	2,22	100

Sumber: Moeis dkk, 1995, *Profil Kemiskinan di Indonesia*

pengentasan kemiskinan di pedesaan yaitu (1) pengentasan kemiskinan penduduk di desa tertinggal melalui Inpres Desa Tertinggal (IDT) dan (2) pengentasan kemiskinan melalui pembangunan keluarga sejahtera di daerah desa tidak tertinggal.

Kantor Menteri Negara Kependudukan/BKKBN secara khusus memfokuskan pada upaya pengentasan kemiskinan di daerah tidak tertinggal melalui pembangunan keluarga sejahtera dengan pengembangan jaringan ekonomi pedesaan. Diawali dengan pengembangan gerakan bangga suka desa melalui program pelaju, pemaju, penguja, dan diikuti dengan pencanangan program takesra dan kukesra, diharapkan jumlah keluarga miskin atau prasejahtera dan sejahtera I yang saat ini masih berjumlah lebih kurang 55 persen dari seluruh keluarga di Indonesia dapat segera dihapuskan.

Pengentasan kemiskinan melalui gerakan bangga suka desa yang dijabarkan dengan program pemaju, pelaju, takesra, dan kukesra pada dasarnya mengambil prinsip pada pengembangan ekonomi pedesaan yang mandiri dan swasembada. Untuk itu, keberadaan lembaga perekonomi-

an di pedesaan diupayakan untuk terus dikembangkan dan ditingkatkan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam meningkatkan keberadaan lembaga perekonomian ini ialah tingkah laku perorangan anggota, kelompok masyarakat, bidang usaha ekonominya, upaya peningkatan kesejahteraan melalui peningkatan harga untuk barang yang dihasilkan, upah tenaga kerja, kesempatan kerja yang terbuka, hubungan konsumsi dengan tabungan yang ada, serta kaitannya dengan tujuan-tujuan investasi ekonomi pedesaan. Dengan demikian, keberhasilan program bangga suka desa tidak semata-mata terletak pada keberhasilan penyediaan modal bagi keluarga-keluarga prasejahtera dan sejahtera I, tetapi juga didukung dan disertai oleh ciri sifat khas yang dimiliki masyarakat pedesaan yang ulet, tangguh, penuh kegotong royongan, dan peduli untuk bahu-membahu melakukan upaya peningkatan kesejahteraan diri, keluarga, dan masyarakatnya. Dengan demikian, pendekatan kelompok bagi pengembangan ekonomi pedesaan dirasakan sangat cocok dengan kondisi dan ciri sifat masyarakat pedesaan.

Referensi

Indonesia. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 1993. *Panduan program inpres desa tertinggal*. Jakarta.

Indonesia. Biro Pusat Statistik. 1992. *Kemiskinan dan pemerataan pendapatan di Indonesia 1976-1990*. Jakarta.

Indonesia. Menteri Negara Kependudukan/Kepala BKKBN. 1996. *Pengentasan kemiskinan melalui pembangunan keluarga sejahtera di desa tidak tertinggal*. Jakarta.

----- . 1997. *Ekonomi keluarga bangkit kemiskinan semakin sedikit*. Jakarta.

- The International Bank for Reconstruction and Development. 1990. *Indonesia: poverty assessment and strategy report*. Washington DC.
- Moeis, Jossy P., et al. 1995. "Profil kemiskinan di Indonesia", dalam Arsjad Anwar M., ed. *Sumberdaya, teknologi, dan pembangunan*. Jakarta: Gremedia Pustaka Utama.
- Mubyarto. 1995. "Program IDT dan pemberdayaan masyarakat perdesaan", makalah disampaikan pada *Pertemuan Pengembangan Konsep Bangga Suka Desa*. Jakarta: Kantor Menteri Negara Kependudukan/BKKBN.
- Nafzinger E. Wayne. 1997. *The economics of developing countries*. New Jersey: Prentice Hall International.
- Nasution, Anwar. 1992. "Demokrasi ekonomi di sektor industri manufaktur", dalam M. Arsjad Anwar, et al. *Pemikiran, pelaksanaan, dan perintisan pembangunan ekonomi*. Jakarta: Gramedia.
- Nurdin, Bahri. 1996. "Ekonomi makro perdesaan: suatu tinjauan ekonomi kelembagaan tentang tabungan masyarakat", makalah disampaikan dalam *Kelompok Kerja Pengarahan Persebaran dan Mobilitas Penduduk*. Jakarta: Kantor Menteri Negara Kependudukan/BKKBN.
- Sayogyo. 1996. "Program IDT dalam menanggulangi kemiskinan", makalah disampaikan pada *Pertemuan Kelompok Kerja Pengarahan Persebaran dan Mobilitas Penduduk*. Jakarta: Kantor Menteri Negara Kependudukan/BKKBN.
- Sjahrir. 1995. *Catatan ekonomi Indonesia*. Jakarta: Adhiprint Indonesia.
- Tjiptoherijanto, Prijono. 1995a. *Kemiskinan*. Jakarta: s.n.
- 1995b. "Pengentasan kemiskinan", makalah disampaikan dalam *Lokakarya Kepedulian Perguruan Tinggi Swasta dalam Penanggulangan Kemiskinan se wilayah Indonesia Barat*, Bandar Lampung, 26 September. Bandar Lampung?: s.n.
- 1995c. "Peran pekerja dalam peningkatan kualitas industri/jasa menghadapi tuntutan manajemen mutu dalam persaingan pasar bebas", makalah disampaikan pada *Seminar Nasional Pengembangan Kualitas Industri/Jasa Menghadapi Persaingan Pasar Bebas*, melalui Konsep Kemitraan antara Pengusaha dengan Keluarga Pekerja, Jakarta 27 September.
- 1996a. *Konsep dan pelaksanaan demokrasi ekonomi di Indonesia*. Jakarta: s.n.
- 1996b. *Taksin-Takesra*. Jakarta: s.n.
- World Bank. 1994. *Indonesia: sustaining development*. Washington, D.C.